

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM EVALUASI REFORMASI  
BIROKRASI (SERABI) KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019**

**Aulia Nursi Kusumaningtyas**

**Email: [aulianursi06@gmail.com](mailto:aulianursi06@gmail.com)**

**Dr.Sos. Dra. Fitriyah, M.S**

**Email: [fitriyahsemarang@yahoo.co.id](mailto:fitriyahsemarang@yahoo.co.id)**

**Departemen Politik dan Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

**Website: <https://fisip.undip.com/> - Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai implementasi penggunaan aplikasi Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi atau yang disebut dengan SERABI di Kabupaten Pemalang tahun 2019. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori implementasi kebijakan Franklin & Reply dan Edward III yang digunakan untuk mengetahui hasil implementasi dan hambatan dalam penggunaan aplikasi SERABI sebagai percepatan reformasi birokrasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi dan hambatan penggunaan aplikasi SERABI dalam proses pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SERABI dalam pelaksanaannya telah memberikan kemudahan dalam monitoring dan evaluasi input penilaian reformasi birokrasi di Kabupaten Pemalang, namun belum dapat dikatakan maksimal karena munculnya berbagai hambatan dari faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang mengharuskan aplikasi dihentikan sementara waktu untuk perbaikan dan pengembangan. Implementasi kebijakan penggunaan aplikasi SERABI masih menunjukkan ketidakberhasilan yang mana kebijakan diterapkan tanpa adanya sumberdaya dan peraturan pendukung untuk mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan.

**Kata Kunci:** Reformasi Birokrasi, Inovasi, Aplikasi SERABI.

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM EVALUASI REFORMASI  
BIROKRASI (SERABI) KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019**

**Aulia Nursi Kusumaningtyas**

**Email: [aulianursi06@gmail.com](mailto:aulianursi06@gmail.com)**

**Dr.Sos. Dra. Fitriyah, M.S**

**Email: [fitriyahsemarang@yahoo.co.id](mailto:fitriyahsemarang@yahoo.co.id)**

**Departemen Politik dan Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

**Website: <https://fisip.undip.com/> - Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

**ABSTRACT**

This study discusses the implementation of the application of the Bureaucratic Reform Evaluation System or what is known as SERABI in Pemalang Regency in 2019. The theory used in this study is the theory of Franklin & Reply and Edward III's policy implementation which is used to determine the results of implementation and obstacles in the use of the SERABI application. as an acceleration of bureaucratic reform. The purpose of this study was to analyze the implementation and barriers to the use of the SERABI application in the evaluation process of bureaucratic reform at the Pemalang Regency Government. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews and documentation. Data analysis uses data reduction, data presentation and conclusions. The results of the study indicate that the SERABI application in its implementation has provided convenience in monitoring and evaluating inputs for evaluating bureaucratic reform in Pemalang Regency, but it cannot be said to be optimal due to the emergence of various obstacles from communication factors, resources, dispositions and bureaucratic structures that require the application to be temporarily suspended for improvement and development. The implementation of the policy on the use of the SERABI application still shows no success in being implemented without the support of resources and supporters to realize the implementation of the policy.

**Keywords:** Bureaucratic Reform, Innovation, SERABI Application.

## PENDAHULUAN

Pada masa orde baru negara Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan perekonomian negara menjadi melemah, hal ini terjadi karena praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam sistem pemerintahan. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional diperlukan adanya sistem reformasi birokrasi yang berkualitas (tepat fungsi dan tepat guna). Reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, birokrasi harus berkomitmen penuh untuk kepentingan rakyat dengan memberikan layanan terbaik yang transparan, akuntabel dan bebas KKN.

Tujuan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada tahun 2015 hingga 2019 merujuk pada pemerintahan berbasis kinerja dengan menerapkan sistem elektronik dalam manajemen kinerja pemerintahan untuk menciptakan kinerja yang efektif, efisien dan ekonomis.<sup>1</sup> Ditengah tatanan global yang semakin cepat mengalami perubahan, birokrasi sebagai sebuah sistem yang menjadi inti dari instrumen keberlangsungan suatu tata kelola pemerintahan harus cepat

dan tanggap beradaptasi dengan berbagai macam perubahan itu, misalnya saja dalam bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) maka pemerintah harus segera bisa memanfaatkan akses TIK berbasis *e-government* yang mana dapat memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah. Pengertian birokrasi menurut Max Webber merupakan suatu bentuk organisasi yang penerapannya berkaitan dengan tujuan/target yang hendak dicapai sistem pemerintahan, ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara sistematis oleh berbagai macam peraturan.<sup>2</sup>

Banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam melakukan proses reformasi birokrasi pemerintahan karena rentan terjadinya tindak pidana korupsi dan penyimpangan lainnya. Oleh karena itu, perlu dibangunnya sistem pengawasan yang ketat untuk mengetahui seberapa optimal kinerja aparatur pemerintah ketika melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat di lingkungan pemerintah daerah.

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

---

<sup>2</sup> Yuningsih, T. (2019). Kajian Birokrasi. Semarang: Departemen Administrasi Publik Press FISIP-UNDIP. Hal. 36.

Pemerintah Kabupaten Pematang telah berkomitmen meluncurkan berbagai inovasi berbasis *e-government* dengan menggelar kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diikuti oleh unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Pematang sebagai pesertanya. Kategori inovasi KIPP meliputi pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik responsif gender, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup serta tata kelola pemerintahan.<sup>3</sup> Salah satu inovasi kategori tata kelola pemerintahan yang mendapatkan penghargaan di kompetisi ini yaitu Aplikasi Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi yang disingkat menjadi SERABI.

Berdasarkan Survei Transparency International Indonesia (TII), Indonesia menempati peringkat ke-96 (dari 180 negara dunia) dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

---

<sup>3</sup> Organisasi.pematang.go.id, “Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kabupaten Pematang” (<http://organisasi.pematang.go.id/>)

2017.<sup>4</sup> IPK tersebut menggambarkan berbagai komponen penentu seperti layanan publik, kepastian hukum, kemudahan berbisnis, hubungan antara politik dengan bisnis, dan lainnya<sup>5</sup>, dikelola secara buruk dan korup. Melihat data Ombudsman RI menunjukkan pemerintah daerah menjadi pihak terlapor yang paling banyak diadukan oleh masyarakat dalam pelayanan publik, ada sebanyak 41,03% laporan selama 2019.<sup>6</sup> Berdasar kedua data ini menjadi relevan untuk meneliti inovasi Kabupaten Pematang dalam menggunakan aplikasi Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi “SERABI” yang diluncurkan pada April 2019 lalu. Penggunaan aplikasi digital ini untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis kinerja di Kabupaten Pematang dengan tujuan melahirkan birokrasi yang berintegritas sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

.SERABI merupakan Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang

---

<sup>4</sup> (TII. *Indeks Persepsi Korupsi 2017*. Jakarta: Transparency International Indonesia. Hlm. 10. [http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017\\_Report1.pdf](http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017_Report1.pdf))

<sup>5</sup> Kpk.go.id. “Berita KPK: Indeks Persepsi Korupsi 2017, Skor Indonesia di Angka 37”. <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/229-indeks-persepsi-korupsi-2017-skor-indonesia-di-angka-37>

<sup>6</sup> Ombudsman.go.id. “Pemerintah Daerah menjadi terlapor yang banyak diadukan oleh masyarakat” <https://ombudsman.go.id/news>.

menggunakan indikator yang ada dalam Peraturan Menteri PAN & RB No. 30 Tahun 2018 dengan melibatkan peran aktif dari seluruh perangkat daerah. Sistem ini disusun guna meningkatkan pengawasan reformasi birokrasi di perangkat daerah yang mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien. Melalui inovasi ini diharapkan dapat memudahkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah secara elektronik.

Dari penjelasan diatas maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut melalui penelitian yang fokus kajiannya pada evaluasi reformasi birokrasi melalui *e-government*. Penelitian ini untuk melihat bagaimana pemerintah daerah dalam mengimplementasikan aplikasi SERABI dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi dan hambatan penggunaan aplikasi SERABI dalam proses pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

### **1. Reformasi Birokrasi**

Secara etimologis birokrasi berasal dari bahasa Perancis yang terdiri dua jenis suku kata, yaitu *bureau* dan *cracy*. Secara teoritis birokrasi diartikan dengan aparatur negara dan secara praktis dapat dikatakan sebagai badan pemerintah atau yang sering disebut dengan *public sector* atau *public administration* yang mana penghasilannya berasal dari uang negara atau rakyat, untuk menjalankan roda pemerintahan dan melayani publik. Birokrasi lahir dari proses sosial yang panjang dan menyangkut kontekstual sosial pada suatu masyarakat.<sup>7</sup> Salah satu tokoh birokrasi yaitu Max Webber mendefinisikan birokrasi merupakan tipe organisasi yang digunakan dalam membantu pemerintahan modern dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai aparatur pemerintahan<sup>8</sup>

### **2. Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Franklin & Ripley implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang terjadi setelah ditetapkannya undang-undang yang dapat memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan dan jenis

---

<sup>7</sup> Setiyono, Budi. 2012. *Birokrasi dalam perspektif politik dan administrasi*. Bandung: Nuansa Cendekia

<sup>8</sup> Mustafa Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung, Alfabeta. Hal. 142

keluaran yang nyata. Terdapat tiga cara untuk mengukur suksesnya implementasi kebijakan, yaitu:<sup>9</sup>

1. Tingkat kepatuhan
2. Kelancaran rutinitas dalam pelaksanaan tidak ada masalah
3. Dampak/manfaat yang diharapkan.

Dalam proses implementasi kebijakan maka perlu adanya pendekatan masalah terkait faktor yang mendukung serta menghambat sebagai syarat proses keberhasilan kebijakan melalui komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>10</sup> Menurut Edward III ada empat faktor yang mempengaruhi, yaitu:<sup>11</sup>

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi dengan komunikasi, yang akan membuat pelaksana kebijakan konsisten dalam pelaksanaannya. Terdapat indikator dalam keberhasilan komunikasi implementasi yaitu penyampaian

komunikasi yang baik, adanya komunikasi yang jelas dan tidak membingungkan dan konsistensi yang diberikan tidak berubah-ubah.

2. Sumber daya

Sumber daya pendukung seperti, kesiapan sumber daya manusia baik kesiapan secara keahlian dan kemampuan serta kesiapan dalam sumberdaya berupa fasilitas ataupun sarana dan prasarana.

3. Disposisi

Merupakan komitmen oleh para pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan secara efektif dan berkelanjutan.

4. Struktur Birokrasi

Kesesuaian antara struktur organisasi yang menjadi pelaksana suatu implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini yang perlu dijaga adalah agar setiap implementasi tidak terjadi perpecahan dalam birokrasi, hal ini akan menghambat pelaksanaan kebijakan publik.

### 3. *Good Governance*

Secara terminologis *governance* dipahami sebagai pemerintahan, hal ini membuat banyak yang berasumsi bahwa *governance* merupakan sinonim dari *government*. Sedangkan secara etimologi diartikan sebagai penyelenggaraan yang

---

<sup>9</sup> Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. *Semarang: Widya Karya*.

<sup>10</sup> Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 99-103.

<sup>11</sup> Anggara, S, Op.cit., hal. 250.

baik, Oleh karenanya konsep *governance* harus dipahami suatu proses, bukan struktur ataupun institusi.<sup>12</sup>

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), *governance* itu meliputi pemerintah, sektor swasta, dan *civil society* serta interaksi antar ketiga elemen tersebut. Ciri *good governance* yaitu mengikutsertakan semua, transparan, dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Selain itu, Lembaga administrasi negara (LAN) mengartikan *governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service*.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam *penelitian* implementasi penggunaan aplikasi sistem evaluasi reformasi birokrasi “SERABI” Kabupaten Pematang Jaya adalah kualitatif deskriptif. Alasan penggunaan hal

tersebut yaitu guna mengetahui secara mendalam proses kejadian di lapangan dengan menganalisis suatu fenomena atau kasus yang relevan dengan fokus penelitian yang dialami.

Obyek lokasi penelitian ini yaitu kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya sebagai instansi yang berwenang dalam mengelola dan melaksanakan aplikasi Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi “SERABI”. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumentasi.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Alur penggunaan Aplikasi SERABI**

Di era modern saat ini aplikasi *e-government* sangat dibutuhkan pemerintah guna memudahkan proses kerjanya. Aplikasi SERABI hadir guna membantu pemerintah dalam melaksanakan evaluasi reformasi birokrasi bagi perangkat daerah sehingga terciptanya pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

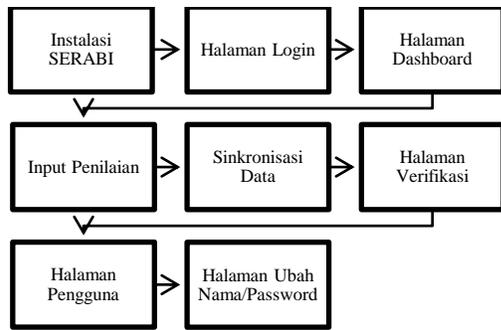
Proses pengisian evaluasi reformasi birokrasi dengan menggunakan sistem *online* dapat diakses dimana saja tanpa terbatas waktu. Adapun panduan aplikasi SERABI secara detail sebagai berikut.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mohammad Mahfud MD, Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi dalam Pemerintahan yang bersih, cet.2 (Yogyakarta: UII Press,2001 hal. 5)

---

<sup>13</sup> Buku Panduan Aplikasi SERABI, 2019.



## Implementasi Penggunaan Aplikasi SERABI

Reformasi birokrasi dalam pemerintahan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efisien, efektif dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dapat memberikan gambaran capaian reformasi birokrasi di tiap instansi baik pada pemerintahan pusat maupun daerah. Hal ini merupakan salah satu perwujudan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). PMPRB merupakan kegiatan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga dan Kementrian. Nilai tersebut nantinya akan diolah dan dikeluarkan secara resmi oleh Kementrian PAN dan RB.

Pada era digital seperti saat ini birokrasi pemerintah harus bisa menyesuaikan dan memanfaatkan teknologi informasi agar dapat memberikan perbaikan

dan peningkatan kualitas secara maksimal. Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya berupaya berinovasi dengan memanfaatkan teknologi berbasis IT dengan membuat aplikasi yang diberi nama SERABI.

SERABI adalah Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang menggunakan indikator-indikator yang ada dalam Permenpan RI No. 30 Tahun 2018 dengan melibatkan peran aktif dari seluruh perangkat daerah. Sistem ini disusun guna meningkatkan pengawasan reformasi birokrasi di perangkat daerah yang mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaan reformasi birokrasi dan karenanya dapat melakukan perbaikan berkelanjutan. Aplikasi SERABI menggunakan indikator-indikator yang tertuang dalam Permenpan RI No. 30 Tahun 2018.

Kinerja pemerintah harus diukur dan dinilai supaya diketahui apakah kinerjanya sudah sesuai tujuan atau tidak, namun evaluasi pada Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya belum mencakup seluruh perangkat daerah sehingga tidak terpantau dengan baik.<sup>14</sup> Oleh karena itu tujuan

<sup>14</sup> Ibid, hlm 3.

diciptakannya aplikasi SERABI di Kabupaten Pemalang, yaitu:

1. Untuk meningkatkan pengawasan reformasi birokrasi di seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Pemalang sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien;
2. Untuk meningkatkan komitmen organisasi perangkat daerah;
3. Untuk meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah;
4. Perangkat daerah dapat melaksanakan penilaian mandiri terhadap kinerja organisasinya.

Evaluasi reformasi birokrasi dapat mengukur dan meningkatkan kapasitas institusi melalui fungsi pengawasan guna melaksanakan perbaikan berkelanjutan. Keberadaan Aplikasi SERABI memberi banyak manfaat, diantaranya:<sup>15</sup>

1. Bagi Reformasi Birokrasi  
Dengan melaksanakan fungsi pengawasan maka dapat meningkatkan integritas dan kapasitas institusi yang menghasilkan kepercayaan terhadap pemerintah meningkat.

2. Bagi *stakeholder* internal  
Pemanfaatan teknologi dalam penilaian evaluasi reformasi birokrasi di institusi dapat meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu juga memberikan kemudahan dalam mencakup seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Pemalang, dengan begitu dapat menghemat waktu dan biaya.
3. Bagi *stakeholder* eksternal  
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas melalui pemenuhan indikator reformasi birokrasi supaya tercipta birokrasi yang akuntabel serta dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
4. Masyarakat  
Masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap sistem penyelenggaraan/kegiatan pemerintah.

Evaluasi reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memanfaatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan kendala atau keterbatasan pada institusi. Berdasarkan tujuan dan manfaat aplikasi SERABI maka dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan monitoring dan

---

<sup>15</sup> E-Proper BPSDMD Provinsi Jawa Tengah (bpsdmd.jatengprov.go.id)

evaluasi guna meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pematang Jaya serta dapat melakukan penghematan waktu dan biaya yang dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN.

Pada penggunaan Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi (SERABI), membutuhkan sumber daya yang mencukupi supaya aplikasi dapat bekerja secara maksimal. Sumber daya yang dibutuhkan adalah:

1. Admin tingkat kabupaten dengan fasilitas pendukung yang terdiri dari:
  - a. Sumber daya manusia, yang dibutuhkan minimal 1 orang programmer sebagai pihak yang membuat aplikasi, minimal 1 orang admin untuk mengelola aplikasi secara makro, memverifikasi data, mengkoordinasikan admin-admin tingkat perangkat daerah dan menjawab pertanyaan atau kesulitan yang dialami oleh perangkat daerah dalam penggunaan aplikasi ini.
  - b. Sarana prasarana, yang dibutuhkan minimal 1 unit laptop/komputer PC, 1 buah printer dan 1 buah scanner;

- c. Anggaran, yang dibutuhkan adalah alokasi anggaran untuk penyusunan dan pengelolaan aplikasi evaluasi reformasi birokrasi;

2. Admin tingkat perangkat daerah dibutuhkan fasilitas pendukung yang terdiri dari :

- a. Sumber daya manusia, dibutuhkan minimal 1 orang petugas admin/operator yang menangani penginputan data, verifikasi data dan pengoperasian aplikasi pada perangkat daerah;
- b. Sarana prasarana yang dibutuhkan terdiri dari: minimal 1 unit laptop/komputer PC, 1 buah *printer* dan 1 buah *scanner*.

Sumber daya yang saat ini telah tersedia pada Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dan pada perangkat daerah berupa akses internet, sarana dan prasarana berupa laptop/komputer dan printer/scanner serta SDM yang memiliki kemampuan di bidang IT sebagai admin SERABI. Kapasitas ketersediaan SDM merupakan hal yang sangat penting agar dapat mencapai manfaat dan tujuan dari aplikasi SERABI yang sesuai dengan harapan.

Aplikasi SERABI merupakan inovasi sebagai indikator/tolak ukur kinerja organisasi. Keberlanjutan inovasi SERABI memberikan kemanfaatan apabila ditinjau dari beberapa aspek yaitu:<sup>16</sup>

### 1. Aspek Sosial

- a. Kemajuan Teknologi dalam pengawasan reformasi birokrasi yang cepat mempermudah perangkat daerah untuk dapat menilai secara mandiri kinerja dalam mencapai reformasi birokrasi;
- b. Pelaksanaan evaluasi mandiri menjadi lebih mudah melalui SERABI, output dari perangkat daerah dapat diarahkan secara jelas melalui indikator yang sesuai dengan amanah Peraturan Menteri PAN dan RB
- c. Sosialisasi kebijakan dan informasi terkait dengan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat lebih cepat disampaikan kepada perangkat daerah.

### 2. Aspek Ekonomi

- a. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan efisiensi dalam penggunaan

anggaran dan waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi karena memungkinkan untuk tidak turun langsung ke perangkat daerah;

- b. Penggunaan aplikasi mudah diakses karena akses internet tidak dibatasi ruang dan waktu.

### 3. Aspek Lingkungan Pemerintah

- a. Perangkat daerah akan terpacu dalam meningkatkan pelaksanaan dan capaian reformasi birokrasi pada perangkat daerahnya masing-masing;
- b. Admin pada perangkat daerah terpacu untuk selalu meningkatkan skill dan pengetahuan yang dimiliki.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) OPD

No	Perangkat Daerah	IRB	Predikat
1	Kecamatan Moga	58,75	AA
2	Badan Kepegawaian Daerah	58,37	AA
3	Kecamatan Pematang	58,07	AA
4	Kecamatan Ampelgading	57,56	AA
5	Kecamatan Bantarbolang	54,4	AA
6	Kecamatan Bodeh	54,32	AA
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	53,79	A
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	53,08	A
9	RSUD M. Ashari	52,58	A
10	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	50,99	A
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49,96	A
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	49,77	A
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48,66	A
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47,63	BB
15	Kecamatan Ulujami	46,13	BB
16	Kecamatan Taman	45,22	BB
17	Kecamatan Petarukan	42,84	BB
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42,76	BB
19	Kecamatan Belik	39,7	B
20	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	39,6	B
21	Kecamatan Pulosari	39,15	B
22	Sekretariat DPRD	38,68	B
23	Dinas Tenaga Kerja	37,48	B
24	Kecamatan Watukumpul	36,05	B
25	Dinas Kesehatan	34,95	CC
26	Dinas Perikanan	34,62	CC
27	Kecamatan Comal	34,32	CC
28	Dinas Perhubungan	34,16	CC
29	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	33,26	CC
30	Sekretariat Daerah	31,72	CC
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	31,25	CC
32	Kecamatan Warungpring	31,09	CC
33	Dinas Pertanian	30,66	CC
34	Satuan Polisi Pamong Praja	27,07	C

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 5.

35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26,4	C
36	Inspektorat	26,32	C
37	Dinas Lingkungan Hidup	25,52	C
38	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	20,31	C
39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11,73	D
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	D
41	Kecamatan Randudongkal	0	D

Sumber: Aplikasi SERABI

Dari data diatas menunjukkan bahwa seluruh OPD telah menggunakan aplikasi SERABI untuk penilaian evaluasi reformasi birokrasi. Kabupaten Pemalang mulai melakukan evaluasi reformasi birokrasi secara internal Pemerintah Daerah pada tahun 2015 dan 2016 bagi seluruh OPD. Pada tahun 2017 Kabupaten Pemalang baru mulai mengikuti evaluasi pusat dengan mengirim sampel nilai OPD terbaik yaitu peringkat sepuluh besar dari hasil evaluasi internal pemerintah daerah untuk mewakili Kabupaten. Sampel tersebut berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang akan dinilai langsung oleh Kementerian PAN RB. Sistem penilaian manual berjalan sampai tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pemalang membuat aplikasi untuk penilaian evaluasi birokrasi “SERABI”, Aplikasi SERABI diluncurkan pada 27 April 2019, namun dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi SERABI oleh OPD hanya berlangsung satu tahun saja yang mana masih tahap awal dalam penggunaan.

**Tabel Implementasi SERABI**

Tanggal	Keterangan
27 April 2019	Aplikasi SERABI mulai digunakan
1 Januari 2020	Aplikasi SERABI dihentikan sementara
2020-sekarang	Pengembangan Aplikasi

## **Analisa Implementasi SERABI**

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan implementasi SERABI Pemerintah Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dari penerapan Aplikasi SERABI itu sendiri yaitu untuk mengukur dan mengevaluasi implementasi Reformasi Birokrasi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Hasil penelitian mengenai implementasi aplikasi SERABI Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

### **1. Aspek Kepatuhan**

Hasil penelitian terhadap aspek kepatuhan dalam implementasi aplikasi SERABI pemerintah Kabupaten pemalang sudah berjalan dengan baik. Semua OPD sudah melakukan penilaian secara mandiri dan sudah diinput kedalam sistem aplikasi SERABI sesuai dengan lembar kerja evaluasi.

Dari 41 OPD yang telah menginput terdapat 3 OPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan Randu

dongkal) yang nilainya belum sesuai yaitu mendapat skor nilai D. Berdasarkan wawancara dengan salah satu informan bahwa ada beberapa OPD yang memang dalam pelaporan aplikasi SERABI tidak melakukan input sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan hal ini mengindikasikan bahwa ada beberapa OPD yang hanya sebatas menyampaikan laporan untuk memenuhi kewajiban pelaporan.

## 2. Aspek Kelancaran Rutinitas

Kelancaran rutinitas dalam implementasi aplikasi SERABI Kabupaten Pematang Siantar sudah berjalan cukup baik, namun belum semua aspek kelancaran rutinitas berjalan sesuai dengan harapan. Seperti hasil wawancara dengan narasumber, bahwa pada tahun 2020 Kementerian PAN RB mengeluarkan aplikasi bernama PMPRB Online yang secara umum aplikasi tersebut hampir sama dengan aplikasi SERABI guna menilai evaluasi RB dimasing-masing daerah. Aplikasi SERABI yang berjalan pada saat itu belum terintegrasi dengan aplikasi PMPRB Online sehingga menimbulkan *double entry* data yang mana tidak efisien dan efektif.

## 3. Aspek Manfaat (Dampak) yang Diharapkan

Dampak dari implementasi aplikasi SERABI Kabupaten Pematang Siantar sudah baik,

hal ini didukung dengan data bahwa sebagian besar OPD yang sudah melakukan penilaian mandiri. Sehingga manfaat dari aplikasi SERABI dapat terwujud seperti: mempermudah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi sehingga dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Siantar dan dapat melakukan penghematan waktu dan biaya sehingga meningkatkan kinerja dan meningkatkan profesionalisme ASN.

Matrik Implementasi Aplikasi Serabi

No	Aspek Kesuksesan Implementasi SERABI	Deskripsi
1.	Aspek Kepatuhan	<p>OPD dapat melakukan penilaian mandiri melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE)</p> <p>Temuan: terdapat OPD yang hanya melakukan pelaporan untuk memenuhi kewajiban pelaporan tanpa memperhatikan aturan</p>
2.	Aspek Kelancaran Rutinitas	<p>Kelancaran penggunaan aplikasi terhambat akibat munculnya aplikasi serupa dari Kementerian PAN RB</p> <p>Temuan: Belum terintegrasinya Aplikasi SERABI dengan PMBRP Online menimbulkan <i>double entry</i></p>
3.	Aspek Dampak Atau Manfaat	<p>Opd mampu melakukan penilaian mandiri menggunakan aplikasi SERABI</p> <p>Temuan: meningkatkan kinerja dan meningkatkan profesionalisme ASN</p>

## Hambatan Implementasi SERABI

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan aplikasi SERABI. Adapun faktor penghambatnya yaitu:

### 1. Aspek Komunikasi

Komunikasi antara tim RB daerah dengan tim RB pusat terputus sehingga Terjadinya tumpang tindih antara aplikasi SERABI dengan PMPRB Online dalam input data yang belum terintegrasi menyebabkan OPD harus menginput data 2 kali, yaitu: pertama, evaluasi internal Pemerintah Daerah dengan menggunakan Aplikasi SERABI; kedua, Web PMPRB Online untuk dikirim ke Kementerian PAN RB. *Double entry* ini tidak efektif dan efisien, sehingga pemerintah daerah berusaha mengintegrasikan aplikasi SERABI dengan PMPRB Online milik Kementerian PAN RB dengan cara menghubungi dan berkoordinasi antar operator Pemerintah Daerah dan juga operator Kementerian PAN RB. Namun ketika ditindaklanjuti permasalahan ini terkendala dalam putusan pimpinan/pejabat Kementerian sehingga tidak ada kejelasan akan keberlanjutannya.

## **2. Aspek Sumber daya**

Gagasan Aplikasi SERABI merupakan inovasi dari Bagian Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya, namun berdasarkan SOTK tahun 2020 Bagian Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi sudah ditiadakan, alhasil aplikasi SERABI dialihkan ke Bagian Organisasi sebagai penanggungjawabnya. Aplikasi SERABI pada awalnya dikelola

oleh programmer dari ASN BKD Kabupaten Pematang Jaya. Namun dalam proses pengembangan, aplikasi ini dipindah-alihkan ke Dinas Kominfo Kabupaten Pematang Jaya. Pihak Kominfo melakukan pengembangan lebih lanjut untuk memperbaiki sistem dan fungsi-fungsi aplikasi serta penambahan beberapa fitur. Proses pengembangan yang dilakukan oleh Kominfo memakan waktu sehingga menghambat berjalannya penggunaan aplikasi.

## **3. Disposisi**

- Terdapat OPD yang dalam penginputan tidak sesuai dengan lembar kerja evaluasi.
- Terdapat keterlambatan dalam penginputan ke sistem Aplikasi Serabi.

## **4. Struktur Organisasi**

- Belum ada peraturan menteri yang mengayomi integrasi aplikasi PMPRB online dengan aplikasi pemerintah daerah.

Matrik Aspek Penghambat Implementasi SERABI

No	Aspek Penghambat Implementasi SERABI	Deskripsi	Deviasi
1.	Aspek Komunikasi	Komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terputus	Koordinasi terkait pengintegrasian aplikasi SERABI dan PMPRB Online mengalami kendala dalam putusan pimpinan kementerian. Sehingga menimbulkan kebingungan bagi pelaksana (Tim RB Daerah) di lapangan.
2.	Aspek Sumber Daya	Pemindahan penanggungjawab dan Pengelola Aplikasi SERABI	Proses pemindahan ini menghambat keberjalanan penggunaan aplikasi
3.	Aspek Disposisi	Sikap atau karakteristik OPD sebagai implementator masih kurang kuat	Terdapat OPD dalam penginputannya tidak sesuai LKE dan terlambat dalam input data ke Aplikasi SERABI
4.	Aspek Struktur Organisasi	Struktur birokrasi yang masih berbelit belit	Belum adanya peraturan yang mengayomi proses integrasi PMPRB Online dengan aplikasi pemerintah daerah, sehingga dalam pelaksanaannya mengalami hambatan

## PENUTUP

### KESIMPULAN

Aplikasi SERABI dalam pelaksanaannya telah memberikan kemudahan bagi OPD dalam input penilaian reformasi birokrasi dengan dapat dilakukannya evaluasi secara mandiri sehingga hasil capaian reformasi birokrasi pada perangkat daerah dapat terukur dan diperingkat. Namun evaluasi reformasi birokrasi menggunakan aplikasi SERABI belum maksimal dalam penggunaannya. Masih banyak catatan-catatan yang harus diperbaiki, hal ini dilihat dari faktor penghambat yang muncul dalam proses penggunaan aplikasi SERABI di Kabupaten

Pemalang yaitu (1) terputusnya komunikasi antara tim RB Kabupaten dengan Tim RB pusat sehingga proses integrasi aplikasi terhambat, (2) perubahan penanggungjawab dan pengelola aplikasi SERABI, (3) terdapat OPD yang terlambat dalam penginputan data ke aplikasi SERABI, (4) Belum adanya peraturan khusus yang mengatur proses integrasi PMPRB Online dengan aplikasi milik Pemerintah Daerah. Dengan banyaknya kekurangan pada aplikasi SERABI membuat aplikasi dihentikan sementara waktu sembari menunggu keputusan akan keberlanjutan penggunaan aplikasi ini. Implementasi kebijakan penggunaan aplikasi SERABI masih menunjukkan ketidakberhasilan yang mana kebijakan diterapkan tanpa adanya sumberdaya dan peraturan pendukung untuk mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan.

### SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu segera diintegrasikannya aplikasi SERABI dengan PMPRB Online supaya dapat segera digunakan dan dimanfaatkan kembali oleh OPD, mengingat aplikasi SERABI versi terbaru sudah selesai dikembangkan.

2. TIM RB Kabupaten perlu memastikan terkait keberlanjutan penggunaan aplikasi SERABI supaya keberadaan aplikasi memiliki kejelasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. Bandung: Pustaka Setia, Hal. 39.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, Hal. 168.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta; Gava Media, Hal 107.
- Mohammad Mahfud MD. (2001). *Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi dalam Pemerintahan yang bersih, cet.2*. Yogyakarta: UII Press, 2001 hal. 5.
- Mustafa, Delly. (2013). *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta, Hal. 142.
- Saifudin, Azwar. (2005). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 91.
- Setiyono, Budi. (2016). *Birokrasi dalam perspektif politik dan administrasi*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Yuningsih, T. (2019). *Kajian Birokrasi*. Semarang: Departemen Administrasi Publik Press FISIP-UNDIP. Hal. 36.

## WEBSITE

- Bagian Organisasi, “Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kabupaten Pemalang”* (<http://organisasi.pemalang.go.id/>)
- E-Proper BPSDMD Provinsi Jawa Tengah ([bpsdmd.jatengprov.go.id](https://bpsdmd.jatengprov.go.id)) diakses 10/9/2021
- III. *Indeks Persepsi Korupsi 2017*. Jakarta: Transparency International Indonesia. Hlm. 10. [http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017\\_Report1.pdf](http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017_Report1.pdf))

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)(<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/229-indeks-persepsi-korupsi-2017-skor-indonesia-di-angka-37>)

[www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id) (<https://ombudsman.go.id/news>)

## SUMBER LAIN

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010
- Aplikasi SERABI Tahun 2019
- Buku Panduan Aplikasi SERABI, 2019